

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Wisata Lembah Desa Pulutan

David Safri Anggara¹, Muhammad Rezki²

Abstrak

Dahulu desa selalu menjadi kawasan yang selalu diidentikkan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Namun, pada beberapa tahun terakhir desa menjadi sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, pemerintah memberikan otonomi khusus untuk desa agar bisa membangun wilayahnya sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki melalui UU Desa. Salah satu desa yang berhasil mengimplementasikan amanat ini adalah Desa Pulutan melalui wisata lembah desa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terkait konsep pemberdayaan yang dilakukan di wisata lembah desa. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tahapan pemberdayaan antara lain; penyadaran, pengkapasitasan dan pemberdayaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wisata yang dikelola BUMDes ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi lembah desa dan mengajak masyarakat untuk bermitra dengan pihak pengelola dengan cara menjajakan kuliner tradisional. Selain itu, fasilitas dari lembah desa menarik karena menyuguhkan sistem pertanian modern yakni mina padi.

Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Wisata Lembah Pulutan

Abstract

In the past, villages were always identified with poverty and underdevelopment. However, recently villages have been in the spotlight from various parties. This is because the government has given special autonomy to villages so that they can develop their territory according to their local potential through the UU Desa. Village that has successfully implemented this mandate is Pulutan Village through Wisata Lembah Desa. This article aims to examine more deeply the concept of empowerment carried out in valley village tourism. The researcher uses descriptive qualitative method with empowerment stage approach including; awareness, capacity building and empowerment. The results indicate that tourism managed by BUMDes is carried out by utilizing the potential of the village valley and inviting the community to partner with the manager by selling traditional culinary delights. In addition, the facilities from the village valley are interesting because they present a modern agricultural system, namely mina padi.

Keywords: Empowerment, Community, Pulutan Valley Tourism

Pendahuluan

Desa sering menjadi sorotan dari berbagai pihak sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pasalnya pemerintah sedang gencar gencarnya untuk melakukan pembangunan dari kawasan pedesaan (Octastefani et al., 2019). Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan kondisi desa yang seringkali memprihatinkan dan dianggap terbelakang. Zaman dahulu desa selalu dicap sebagai daerah yang miskin dan kurang berpendidikan sehingga desa hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan. Ada anggapan bahwa masyarakat kecil di daerah pedesaan tidak mampu memajukan desanya (Chambers, 1987; Wastutiningsih,

2004). Padahal di sisi lain desa memiliki potensi kekayaan lokal yang tidak ternilai harganya (Anggara, 2020). Hanya saja masih sedikit masyarakat yang mampu melihat potensi yang mereka miliki padahal jika dapat dimanfaatkan secara optimal maka akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat (Rochman, 2017).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mengembangkan potensi yang ada di desa (Kristanto & Putri, 2021). Tidak sedikit desa yang menerapkan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan wisata desa (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Pariwisata

¹ Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (email korespondensi: davidsafrianggara@gmail.com)

² Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (email: muhammadrezki1999@mail.ugm.ac.id)

desa mampu menjadi solusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat baik tingkat atas maupun kelas bawah. Pengembangan wisata desa menjadi bentuk dari pengembangan masyarakat agar mampu mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi wisata yang dimiliki (Rochman, 2017). Selain itu masyarakat sekitar kawasan wisata umumnya bisa mendirikan berbagai usaha seperti penginapan, warung, jasa transportasi dan pemandu wisata yang mampu menjadi sumber ekonomi baru (Masitah, 2019). Berangkat dari hal tersebut sektor pariwisata menjadi salah satu bentuk pengoptimalan potensi yang ada di desa yang mana bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

Perkembangan wisata desa cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Jejaring Desa Wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat 3640 Desa yang terdaftar sebagai desa wisata yang mana 2392 termasuk dalam kategori rintisan, 957 masuk kategori berkembang, 280 termasuk kategori maju dan 11 desa masuk kedalam kategori mandiri (JADESTA, 2022). Selain dukungan dari pemerintah, meningkatnya wisatawan yang tertarik dengan panorama alam pedesaan menjadi faktor yang membuat wisata desa semakin berkembang (Damanik, 2013; Santoso, 2022). Meskipun demikian, realitanya perkembangan wisata desa tidak bisa menjadi tolak ukur dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan wisata seringkali keterlibatan masyarakat sekitar sangat rendah baik karena kurangnya informasi atau peran *stakeholder* yang kuat. Akibatnya masyarakat sekitar justru terpinggirkan (Wahyuni, 2019). Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya. Desa harus dihadapkan oleh monopoli pemilik modal yang berisiko meminggirkan warganya.

Pemerintah telah mengesahkan UU Desa sebagai upaya untuk mendorong pembangunan yang merata. Dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 pembangunan yang baik harus melibatkan seluruh elemen masyarakat baik dari kelompok petani, nelayan, miskin, kaya, disabilitas dan pemuda. Melalui pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan dan partisipatif akan terwujud hasil pembangunan yang dapat dinikmati bersama (Salim et al., 2015). Selain itu dengan peraturan ini desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi dan keragaman lokal sehingga desa tidak

hanya objek dalam pembangunan namun juga aktor. Dengan demikian desa seharusnya lebih bisa mandiri dan fleksibel untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan keunikan yang dimiliki juga melibatkan semua unsur masyarakat. Kewenangan ini yang harusnya jadi pondasi yang kuat untuk mengelola wisata desa untuk kesejahteraan bersama.

Desa Pulutan menjadi salah satu desa yang mampu memanfaatkan potensi lokal dan otonomi desa untuk membangun wilayahnya. Pemerintah Desa Pulutan melalui BUMDes Maju Mandiri Pulutan telah mengimplementasikan amanat UU Desa untuk memberdayakan masyarakat melalui wisata lembah desa. Destinasi ini mengusung konsep wisata keluarga berbasis edukasi pertanian dengan tawaran fasilitas wahana mina padi, gazebo, kolam ikan, *spot* foto dan taman bunga. Selain itu di sekeliling tempat wisata terdapat panorama pemandangan alam persawahan yang asri. Konsep dari lembah desa semakin menarik ketika semua yang disajikan berasal dari potensi lokal masyarakat sekitar.

Wisata Lembah Desa Pulutan menjadi lokasi yang strategis karena berada diantara kecamatan yang padat sehingga cukup aksesibel untuk diakses dari wilayah lain di Gunungkidul. Pada awal pembentukan di tahun 2019 sempat pasang redup karena permasalahan dana dan kondisi waktu pandemi. Namun sejak tahun 2022 tepatnya bulan Juni pemerintah Desa Pulutan melalui BUMDes mengusung konsep baru (Sistem Informasi Desa Pulutan, 2019; Sorot GunungKidul, 2023). Wisatawan yang berkunjung meningkat setiap bulannya bahkan berdasarkan situs berita Sorot Gunungkidul pada bulan Desember 2022 kunjungan wisatawan ke destinasi ini mencapai 24 ribu pengunjung.

Pengelolaan Wisata Lembah Desa Pulutan semestinya memiliki proses yang menarik untuk diketahui secara mendalam. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap konsep dan proses pemberdayaan masyarakat melalui potensi lokal di Wisata Lembah Desa. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan hasil kajian terhadap pengelolaan Wisata Lembah Desa yang mana merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Dengan penelitian ini, harapannya mampu menjadi tambahan khasanah pengetahuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait wisata desa dan menjadi rekomendasi bagi praktisi untuk memberdayakan masyarakat.

Kerangka Teori

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata "power" yang artinya keberdayaan atau kekuasaan (Suharto, 2009). Kekuasaan yang dimaksud adalah pemberian kemampuan terutama mereka yang lemah agar bisa mengakses sumber produktif untuk memenuhi kebutuhannya (Ife & Tesoriero, 2008). Dimensi dari pemberdayaan adalah kekuasaan dan kekuatan (Rozaki et al., 2006). Memaknai pemberdayaan sebagai kekuasaan dalam pembangunan perlu melihat konteks dan manifestasi kekuasaan dalam masyarakat (Chauduri, 2016). Hal ini penting mengingat kekuasaan memiliki makna yang dapat mengarah pada konotasi negatif maupun positif. Oleh sebab itu dalam konteks pembangunan, pemberdayaan perlu memungkinkan masyarakat lemah dan rentan memperoleh manfaat dari kekuasaan. Salah satunya contoh upaya yang bisa dilakukan adalah memungkinkan masyarakat pedesaan yang sering dianggap terbelakang dengan memberikan perhatian terutama dari pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat. Bentuk program yang saat ini dijalankan adalah membentuk wisata lembah desa.

Pemberdayaan ditinjau dalam tataran proses maka terdiri dari beberapa tahapan. Hogan dikutip dari (Anggara, 2020) menerangkan setidaknya ada lima tahapan utama pemberdayaan yaitu; menghadirkan kembali ingatan mengenai kondisi berdaya dan kondisi tidak berdaya, mendiskusikan penyebab kondisi-kondisi itu terjadi, mengidentifikasi masalah atau program, mengidentifikasi potensi atau sumber daya yang dapat dikelola dan menetapkan aksi yang dapat dilakukan. Dua tahap awal di atas jika diklasifikasikan merujuk pada pencarian kesadaran dan urgensi pemberdayaan oleh masyarakat. Selebihnya merupakan penggalian potensi dan implementasi program. Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) juga menjelaskan secara sederhana tahapan pemberdayaan yakni dengan mulai dari membangun kesadaran, membangun kapasitas dan delegasi atau memainkan peran pemberdayaan.

Membangun kesadaran adalah tahap awal dalam pemberdayaan. Kesadaran memiliki tiga bentuk dan kesadaran yang diharapkan dalam pemberdayaan adalah kesadaran kritis (Freire, 2008). Kesadaran ini merupakan mengertinya masyarakat akan kondisi yang timpang juga disertai keinginan untuk mengubahnya. Namun

masyarakat yang masih dalam kesadaran magis dan naif sulit untuk melakukan perubahan sehingga membutuhkan intervensi dari luar. Rozaki et al. (2006) menambahkan bahwa pihak luar bukan sebagai pendikte melainkan sebagai fasilitator yang memudahkan, mengorganisir, mendorong ataupun memotivasi. Hubungan dengan pihak luar adalah hubungan yang setara, saling percaya, terbuka dan tumbuh berkembang secara bersama-sama. Tahapan ini juga berarti memungkinkan seluruh masyarakat untuk mengakses informasi. Akses pada informasi dapat meningkatkan perbendaharaan pengetahuan akan manfaat dan dampak positif dari suatu kegiatan. Kesadaran akan manfaat kegiatan membuat orang menjadi terbuka dan mau berpartisipasi dengan pihak luar serta rela untuk berpartisipasi (Usman, 2018).

Akses informasi bisa dilakukan melalui diskusi, musyawarah ataupun lewat media-media komunikasi. Hal ini dilakukan juga agar masyarakat sadar dan bangga akan keunikan daerahnya. Pengelola yang ingin meningkatkan dukungan terhadap pariwisata melalui kebanggaan diri perlu mengetahui persepsi masyarakat tentang kekhasan tempatnya. Jika penduduk tidak mengetahui dan menyadari komunitas mereka unik, maka penduduk tidak akan memberikan dukungan terhadap wisata. Cara untuk meningkatkan persepsi masyarakat akan daerah mereka yang unik adalah dengan sosialisasi melalui sudut pandang turis, untuk mengetahui keunikannya (Boley et al., 2018). Dengan demikian masyarakat mampu menyadari potensi yang mereka miliki kemudian berupaya untuk mengembangkannya (Latifah, 2019).

Membangun kapasitas merupakan bentuk atau cara untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (Fahrudin, 2012). Dengan potensi yang kuat maka masyarakat akan semakin berpeluang untuk mendayagunakan potensi secara maksimal. Langkah-langkah riil yang dapat ditempuh masyarakat dalam membangun kapasitas ini misalnya penyediaan aksesibilitas informasi terkait berbagai peluang, perkuatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat untuk memecahkan masalah, dan menumbuhkan rasa percaya diri yang mampu menunjang kemandirian mereka (Alfitri, 2011). Selain itu dalam pemberdayaan masyarakat transfer pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi modal dasar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (Suparjan

& Suyatno, 2003). Aspek kognitif masyarakat menjadi bagian dari pengkapasitasan. Misalnya saja pemerintah mengajak pengelola dan masyarakat melakukan studi banding pada desa wisata lain dalam rangka mengamati, meniru dan melakukan sedikit modifikasi sehingga dapat diterapkan pada pengelolaan wisata. Hal ini membuat masyarakat untuk selalu belajar dari kekurangan (*trial-error*). Untuk bagian ini, pemerintah melaksanakan rapat dan evaluasi dengan pengelola. Peneliti memasukkan rapat sebagai bagian dari pengkapasitasan kognitif.

Pemberdayaan (*empowering*) merupakan tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan. Setelah proses selesai masih diperlukan perlindungan bagi kelompok yang masih rentan agar tidak tertindas oleh kelompok yang sudah kuat (Alfitri, 2011). Peran dari masing-masing masyarakat senantiasa didukung serta dikontrol agar stabilitas dapat terjaga. Dengan demikian setiap aktor atau kelompok masyarakat dapat memainkan peranan dan tugas masing-masing sehingga setiap orang memiliki kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk berdaya.

Metode Penelitian

Teknik Penulisan dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Wisata Lembah Desa tepatnya berlokasi di Dusun Temu, Desa Pulutan, Kabupaten Gunungkidul. Subjek penelitian yang diambil antara lain pengelola wisata, pedagang dan pengunjung. Dalam melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam untuk mengumpulkan data Langkah dalam pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut; pertama yakni *indepth-interview*, peneliti akan melakukan wawancara secara personal kepada narasumber terkait. Wawancara memperoleh hasil yang maksimal wawancara akan dilakukan melalui berbagai macam cara diantaranya melalui wawancara secara tidak terstruktur dan wawancara secara mendalam (Creswell, 2014). Wawancara dilakukan kepada ketua BUMDes selaku pengelola, pedagang kios dan pengunjung.

Kedua, melakukan observasi secara mendalam. Observasi berupa pengamatan terhadap suatu objek dengan cara partisipan maupun non partisipan (Moleong, 2010). Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode

partisipan yakni datang menjadi pengunjung wisata lembah desa untuk mengamati kondisi dilapangan sebelum dan saat penelitian. Ketiga yakni melalui studi dokumentasi, peneliti akan mencari data data fisik yang berbentuk seperti buku, jurnal, dokumen monografi desa atau yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen dari beberapa literatur nantinya akan digunakan sebagai alat triangulasi data. Triangulasi ini berguna untuk mengecek keabsahan data dengan cara membandingkan data yang kita dapat dengan sumber dari berbagai literatur (Moleong, 2010).

Data yang berbentuk dokumen, catatan atau rekaman observasi, transkrip wawancara, artefak fisik, rekaman, foto dan video kemudian dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992). Metode tersebut terdiri dari tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil temuan akan dibentuk menjadi deskriptif yang sebelumnya belum jelas menjadi lebih jelas. Pada tahap akhir deskripsi yang telah dipaparkan ditarik kesimpulan dengan pendalaman sebab – akibat, kategorisasi, dan refokusing agar nantinya inti dari tema yang disajikan dapat menjawab rumusan masalah secara tepat dan jelas (Moleong, 2010).

Hasil

Gambaran Wisata Lembah Desa Pulutan

Wisata Lembah Desa terletak di Dusun Temu, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Dusun Temu merupakan salah satu dari sembilan padukuhan di Desa Pulutan. Lembah Desa ini terletak sekitar 37 km dari Keraton Yogyakarta. Sejarah wisata lembah desa Pulutan terhitung pada tahun 2019. Jika dalam lingkup desa lokasi destinasi ini cukup strategis karena menjadi jalan sentral dari berbagai kecamatan, di wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pampang (Kecamatan Paliyan), sebelah timur berbatasan dengan Desa Siraman (Kecamatan Wonosari), sebelah barat berbatasan dengan dengan Desa Plembutan dan Wiyoko (Kecamatan Playen). Secara demografis Desa Pulutan dihuni oleh kelompok masyarakat baik dari sosial, ekonomi dan agama yang beragam.

Kondisi geografis dari Desa Pulutan juga sangat cocok untuk pertanian. Desa Pulutan terkhusus di Dusun Temu terdapat sawah yang memiliki sumber pengairan atau sumur bor sehingga tidak perlu menunggu musim hujan

untuk mengairi sawah. Hal ini mengakibatkan mayoritas penduduk di Desa Pulutan berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data di SID Desa Pulutan (2020) sebanyak 1284 (27,58%) penduduk menjadi petani, 856 (18,35%) penduduk tidak bekerja dan 483 (10,38%) penduduk mengurus rumah tangga. Untuk sisanya bekerja sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, guru dan lainnya. Meskipun demikian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Desa Pulutan mampu melihat potensi yang ada di desa. Salah satu potensi sumber daya alam yang bisa dikelola menjadi tempat wisata adalah lembah desa dengan cadangan air yang mampu menjadikan lahan pertanian untuk memproduksi hasil panen sebanyak tiga kali dalam setahun. Alhasil, pemandangan sawah akan selalu terlihat di lembah desa. Cadangan air yang melimpah membuat pengelola menggabungkan ladang dengan budidaya ikan. Sistem inilah yang dikenal sebagai sistem mina padi.

Gambar 1
Sistem Pertanian Mina Padi di Wisata Lembah Desa Pulutan



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Pembangunan wisata lembah desa sempat terhenti. Beberapa aset yang dibangun hilang dimakan usia dan tidak permanen. Hingga Akhir tahun 2021, BUMDes Pulutan membuat dan merencanakan pembangunan lanjutan yang tertuang dalam rencana besar. Gagasan tambahan yang menarik dalam tempat wisata ini adalah hidangan teh poci gratis setelah pengunjung masuk ke dalam tempat wisata. Karcis yang diperoleh oleh pengunjung harus ditukarkan ke penjual sesuai nomor karcis. Pada periode ini, BUMDes melakukan kerja

sama dan bermitra dengan masyarakat dimana masyarakat menjadi penyedia kuliner bagi pengunjung yang datang. Pada bulan Juni tahun 2022, wisata lembah desa Pulutan diresmikan oleh Bupati Gunungkidul dan wisata mengalami perkembangan lebih lanjut.

Untuk sementara, wisata Lembah Desa Pulutan memiliki beberapa fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut terdiri dari 25 tempat jajanan kuliner tradisional, 12 gazebo, panggung acara, lahan parkir dan beberapa *spot* foto. Wisata lembah desa pulutan sebagai wisata edukasi juga menyediakan paket wisata bagi anak-anak atau pelajar yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pertanian, budidaya ikan dan sistem mina padi. Panggung acara dapat digunakan bagi pihak yang berminat melaksanakan kegiatan hiburan dan budaya.

Gambar 2
Unit Usaha BUMDes Maju Mandiri Pulutan



Sumber : Olah Data Peneliti, 2023

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan wisata lembah di Desa Pulutan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini ditandai dengan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan desa wisata (Octastefani et al., 2019). Walaupun gagasan diawali oleh BUMDes, namun dalam implementasinya melibatkan masyarakat desa. Masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata sebagai pedagang yang menjajakan kuliner tradisional. Sejalan dengan konsep wisata lembah desa yang menawarkan edukasi, pertanian dan kuliner tradisional.

Bapak Iskandar selaku ketua BUMDes Maju Mandiri mengatakan bahwa;

"...tapi kan pemberdayaan tidak ada. terus kita ubah konsepnya. Kita buka kios 25. Terus kita daftarkan pedagang sekitar situ. Tidak (hanya) pedagang. (Tapi) masyarakat yang ingin diberdayakan. Ada yang dulu hanya buruh tani, momong di rumah. Kita rekrut. Kita buat undian. Terus kita ajak untuk garap itu. Bukan karyawan kami tapi mitra kami. Mereka ada yang tidak buka, kami juga tidak buka. Dua-duanya saling membutuhkan" (Pak I, Wawancara 14 Januari 2023)

Konsep pemberdayaan sebagaimana penjelasan di atas terlihat bahwa ada yang sebelumnya sudah menjadi pedagang di sekitar lembah desa dan ikut bermitra dengan pengelola wisata. Bahkan ada masyarakat yang sebelumnya berperan sebagai ibu rumah tangga dan buruh tani kemudian ikut mengelola wisata lembah desa sebagai pedagang kuliner tradisional. Masyarakat yang berpartisipasi juga dengan senang hati terlibat dalam mensukseskan wisata lembah desa yang notabene sebagai potensi khas desa mereka, sementara itu pengelola juga dapat mensukseskan program kerja yang mereka rumuskan. Hubungan antara keduanya mencerminkan hubungan yang saling mengisi satu sama lain. Pengelola wisata lembah desa dapat dikatakan sebagai pihak pemungkin (*enabler*), yaitu menciptakan suatu kondisi potensi lokal yang dapat berkembang sekaligus pihak penyedia (*fasilitator*) dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga memudahkan masyarakat dalam mendayagunakan potensi lokal (Suharto, 2009).

Pemberdayaan masyarakat di wisata lembah desa Pulutan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Untuk dapat mencapai kondisi yang lebih baik, terdapat tahapan-tahapan yang masyarakat lakukan. Tahapan-tahapan ini menandakan sebuah proses pemberdayaan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Misalnya, perbedaan pendidikan dan umur di antara masyarakat, menunjukkan latar belakang yang tidak sama. Untuk itulah memakai konsep pemberdayaan yang memiliki pendekatan bertahap. Dari awal penawaran konsep gagasan hingga diresmikan oleh Bupati, terdapat tahapan seperti penyadaran, pengkapasitasan dan pemberdayaan yang mewarnai pengelolaan wisata lembah desa Pulutan. Hingga penulisan artikel ini, pemberdayaan masyarakat masih terus berlangsung.

Menghadirkan Potensi yang Selama ini Dimiliki Masyarakat

Penyadaran adalah tahap awal dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Tahapan ini menunjukkan kesadaran ataupun menyadarkan pihak lain dalam melihat potensi lokal yang ada di desa (Alfitri, 2011). Tahap kesadaran juga dapat berupa melihat komparasi pengelolaan desa wisata di tempat lain. Sebelum konsep lembah desa dipilih, pihak pengelola melakukan analisa potensi lembah desa. Kemudian dalam pengelolaannya, pihak BUMDes melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam tahap ini, pengelola lembah desa wisata pernah melakukan *studi* banding ke desa-desa wisata yang ada di daerah Kulon Progo, Sleman dan Bantul sebelum mengimplementasikan gagasan wisata lembah desa Pulutan.

Hasil analisa potensi sumber daya alam di Desa Pulutan adalah lembah desa. Di kawasan tersebut, terdapat sumur bor yang memiliki cadangan air yang melimpah. Kedua, terdapat tanah kas desa yang memiliki lahan seluas 3 hektar. Cadangan air yang melimpah ini mampu membuat petani untuk panen sebanyak tiga kali dalam setahun. Potensi air juga digunakan sebagai budidaya ikan. Hingga petani memadukan ladang pertanian dan kolam ikan yang dikenal sebagai sistem mina padi. Pihak BUMDes yang sedari awal memang berkeinginan untuk menjadikan Pulutan sebagai desa wisata kemudian melihat kalau lembah desa yang berpotensi menjadi tempat berkunjung wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari penuturan Bapak Iskandar sebagai ketua BUMDes Maju Mandiri.

"...Potensi awal mulanya karena memang kita ingin menjadi desa wisata. Terus kita milih milih, menganalisa dan itulah (lembah atau tanah kas desa) yang berpotensi kita jadikan orang berkunjung disitu" (Pak I, Wawancara 14 Januari 2023)

Gagasan wisata lembah desa kemudian melibatkan masyarakat. Walaupun beberapa pihak luar bersedia untuk menjadi investor, namun pihak pengelola lebih memilih untuk melibatkan masyarakat yang ada di desa. Apalagi, terdapat pedagang yang sudah terlebih dahulu mendiami kawasan lembah desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Weni sebagai salah satu pedagang yang menginformasikan jika ia sebelumnya berjualan di tempat yang kini menjadi lahan parkir.

Kemudian dipindahkan di tempat pedagang kuliner yang telah baru dibangun.

"...Kalau saya sejak pertama kali ini dibangun saya sudah jualan disana (lahan parkir), jadi sebelum ini ada (los baru penjual). Udah lama udah beberapa tahun yang lalu." (Bu W, Wawancara 14 Januari 2023).

"...Kalau itu dulu kan masih pribadi, maksudnya siapa yang mau jualan silahkan membuat lapak. Terus pada buat terpal sendiri. Nah setelah dikelola oleh BUMDes baru disediakan lapak sejumlah 25 ini dengan sistem sewa, mendaftarnya juga yang duluan gitu. Kuotanya berapa yang daftar duluan dapat." (Bu W, Wawancara 14 Januari 2023).

Tahap penyadaran juga dapat dilihat dari sosialisasi pihak BUMDes kepada masyarakat yang ingin bermitra. Tidak hanya pedagang namun juga masyarakat yang memiliki profesi berbeda. Sejauh ini, ada masyarakat yang dulunya sebagai ibu rumah tangga kemudian menjadi pedagang di kios nomor 23. Lalu ada masyarakat yang sebelumnya sebagai buruh tani kemudian mencoba untuk mendapatkan tambahan pendapatan dengan menjadi pedagang.

"Dulu sebelum jualan pekerjaannya di rumah. Baru setelah ada wisata ini berjualan, jualan ya untuk ya cari uang, ya pasti setelah ini ada tambahan penghasilan." (Bu M, Wawancara 14 Januari 2023)

Hasil observasi peneliti menunjukkan ada 25 kios yang berdiri artinya kurang lebih 25 pedagang yang sudah bermitra dengan pihak pengelola. Informasi dari pihak pengelola bahwa rata-rata terdapat satu tenaga kerja dalam satu kios walaupun ada anak dan pasangan yang turut membantu. Bahkan ada yang dalam satu kios memiliki sepuluh tenaga kerja. Pada proses penentuan nomor tempat untuk berdagang dilakukan melalui undian. Meskipun sudah ditetapkan masyarakat yang mendapatkan tempat untuk berjualan pada kenyataannya masih banyak yang mengantri atau berkeinginan untuk berjualan. Sebelum wisata resmi dibuka, pengelola wisata lembah desa mengajak pedagang-pedagang yang terpilih untuk melakukan studi banding wisata di Argo Wijil. Ketika itu juga pengelola memberikan pembekalan-pembekalan dan intens melakukan

pertemuan dengan pedagang setiap dua minggu sekali. Lewat arahan pengelola desa wisata, pedagang dapat meningkatkan kesadaran mereka dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi.

Tahap penyadaran juga terlihat saat implementasi gagasan berupa hidangan teh poci gratis. Penyadaran ini dimaknai sebagai pemberian pemahaman bahwa masyarakat pulutan memiliki keunikan dengan menyediakan teh poci di Wisata Lembah Desa Pulutan. Wisata lembah desa menawarkan konsep berupa hidangan minuman gratis. Menurut Pak Iskandar selaku pengelola konsep teh poci belum pernah ada sebelumnya di Kabupaten Gunungkidul. Gagasan yang terbilang baru, di awal penerapannya menuai pertentangan di masyarakat. Pihak pengelola menuturkan bahwa 2-3 bulan konsep menimbulkan pro dan kontra. karena ada yang selisih sepuluh dengan yang lainnya sehingga konsep adil walaupun tidak sama itu sulit. Namun, karena prosesnya untuk menyadarkan pedagang bahwa baik pribadi maupun jangkauan di antara kita tidak selalu sama. Di antara pengunjung juga ada yang tidak menukarkan kupon mereka ke pedagang bersangkutan. Pengertian dan pemahaman terus dilakukan ke pedagang seputar hal itu. Konsep teh gratis inilah yang terus dipertahankan sebagai konsep pemberdayaan. Tujuannya adalah agar semua dagangan pedagang laku walaupun penerapannya sangat sulit. Akhirnya, hal tersebut dapat teratasi oleh kesadaran semua pihak baik pengelola maupun pedagang.

Gambar 3
Hidangan Teh Poci Setelah Menukarkan
Tiket



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Meningkatkan Kapasitas Pengelola dan Penjual Melalui Studi Banding dan Pelatihan

Tahap pemberdayaan selanjutnya adalah pengkapasitasan. Pengkapasitasan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pengelola serta masyarakat yang diberdayakan. Pengkapasitasan dalam pengelolaan wisata lembah desa berupa aspek kognitif, keterampilan, teknis dan manajerial. Hal ini dilakukan secara formal maupun informal. Transfer pengetahuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat yang diberdayakan (Alfitri, 2011). Pengkapasitasan dapat dilihat dari pelatihan, pembekalan, studi banding, pembelajaran berbasis praktik dan rapat yang diselenggarakan antara pengelola dan mitra BUMDes. Informasi dari pihak BUMDes bahwa di desa terdapat tempat seperti pembuatan mebel antik, industri bahan jamu dan industri makanan kecil yang direncanakan menjadi paket wisata. Ini menunjukkan kalau keterampilan masyarakat sudah berjalan.

Pelatihan secara formal dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola wisata lembah desa Pulutan. Pihak pengelola menginformasikan bahwa mereka melakukan izin ke Dinas Pariwisata sembari meminta kesediaan dinas terkait untuk melakukan pelatihan kepada pengurus mereka khususnya pelatihan mengenai pengelolaan wisata. Pelatihan ini secara umum untuk meningkatkan pengetahuan pengelola desa wisata. Informasi sebelumnya juga bahwa pihak pengelola pernah melakukan studi banding ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Bantul bahkan sampai di Kabupaten Purworejo, Jawa tengah menunjukkan sebuah peningkatan aspek pengetahuan melalui komparasi potensi desa sendiri dengan desa yang ada di luar. Pihak pengelola menyebut jika mereka melakukan pengamatan terhadap desa wisata yang mereka kunjungi, melakukan peniruan yaitu dengan membuat desa wisata sendiri kemudian melakukan modifikasi sesuai dengan sumber daya yang ada di desa.

Pengkapasitasan dalam arti pelatihan kepada mitra BUMDes masih kurang terlaksana. Pengkapasitasan kepada mereka masih lewat pembekalan-pembekalan, rapat, studi banding maupun pembelajaran berbasis praktik. Pembekalan semacam ini berupa arahan-arahan yang perlu diperhatikan oleh pedagang. Terdapat perbedaan yang sangat tipis

antara kesadaran dan peningkatan kapasitas kognitif. Orang akan sadar ketika kapasitas kognitifnya bertambah begitupun sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas berupa pelatihan untuk masyarakat diperlukan dalam pengelolaan wisata sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Moayerian et al., 2022). Salah seorang pedagang yang peneliti mewawancarai menerangkan bahwa akan dilaksanakan pelatihan bagi para pedagang namun hingga saat ini belum terlaksana. Pelatihan memiliki urgensi bagi para pedagang namun perlu pelatihan yang sesuai karena para pedagang yang berjualan memiliki menu yang berbeda-beda. Sehingga tidak tepat untuk melakukan satu macam menu pelatihan dengan kondisi hidangan yang bervariasi.

Menjajakan Kuliner Tradisional di Wisata Lembah Desa Pulutan Dengan Menjadi Mitra BUMDes

Tahapan selanjutnya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud disini adalah pemberian daya itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat diberikan kuasa, peluang maupun otoritas sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Dalam pengelolaan wisata lembah desa Pulutan, masyarakat diberikan otoritas dan peluang untuk berpartisipasi dan menjadi mitra BUMDes. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang diperlukan untuk menjadi pedagang di kawasan wisata lembah. Masyarakat yang berpartisipasi adalah pedagang yang siap untuk menjajakan kuliner tradisional dan melayani pengunjung yang datang ke lokasi wisata lembah. Pengunjung yang datang kebanyakan berasal dari orang-orang di sekitar desa. Bahkan ada yang berasal dari luar daerah dikarenakan rasa penasaran setelah mendapatkan informasi dari beberapa kerabat yang pernah datang ke lokasi.

Pihak BUMDes menginformasikan bahwa yang diutamakan untuk menjadi pedagang kuliner adalah masyarakat desa Pulutan. dari 25 kios pedagang yang berjualan 16 di antaranya adalah masyarakat dari dusun Temu dan selebihnya adalah masyarakat dari dusun lain. Kriteria yang digunakan untuk merekrut tidak ada hanya masyarakat yang memiliki kemauan dan mau berproses. Pedagang yang menyewa kios tersebut diharuskan untuk membayar sewa sebesar Rp700,000 untuk setahun. Ini merupakan modal pribadi pedagang walaupun

terdapat satu pedagang yang menggunakan sistem waralaba. Hasil wawancara dengan kios nomor 10, 20 dan 24 juga demikian bahwa ada pembayaran sewa untuk kios yang mereka tempati dengan nominal di atas. Karena konsep wisata lembah juga teh poci gratis, pedagang yang berjualan masing-masing difasilitasi dengan 3 buah teko, 10 cangkir dan 1 buah nampan. Wisatawan hanya perlu untuk membayar kupon masuk seharga Rp 5.000 untuk kemudian ditukarkan sesuai dengan nomor kios yang tertera pada kupon. Harga kupon nantinya akan dibagi menjadi 2 yakni Rp2,500 untuk pedagang dan Rp2,500 untuk pihak pengelola.

Gambar 4
Salah Satu Kios Pedagang



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Dalam tahap ini, masyarakat diberikan otoritas dalam menjajakan kuliner tradisional mereka. Walaupun demikian, masih terdapat arahan dari pihak pengelola. Sebagaimana juga ketika rapat yang dilakukan antara pengelola dan pedagang dalam rangka monitoring dan evaluasi. Informasi yang peneliti terima dari pedagang bervariasi mengenai intensitas rapat yang mereka lakukan. Rapat terkadang dilakukan dua minggu sekali, sebulan sekali dan delapan hari sekali. Bahkan rapat pernah dilakukan ketika tengah malam saat wisatawan sudah tidak berkunjung. Pertemuan mereka juga diselingi lewat arisan dan kerja bakti bersama. Pihak BUMDes juga menginformasikan bahwa terdapat evaluasi bersama dengan para pedagang. Jikalau ada masukan dari pengunjung maka mereka akan menginformasikan ke pedagang seperti masalah durasi pelayanan dan masalah cita rasa yang perlu dibenahi. Tujuannya agar pedagang mengetahui dan

menilai kualitas pelayanan dan makanan mereka dari sudut pandang pengunjung dan hal itu perlu diperhatikan. Mengetahui kelebihan dan keunikan desa dari sudut pandang wisatawan diperlukan untuk meningkatkan perkembangan wisata (Boley et al., 2018).

Mengenai strategi pemasaran, baik pihak pengelola maupun pedagang mengemukakan jika mereka tidak secara intens mewartakan wisata lembah desa. Walaupun terdapat media sosial wisata lembah berupa instagram, namun pengunjung yang berperan penting dalam menginformasikan keberadaan wisata lembah desa. Ketika pengunjung mendokumentasikan kunjungan mereka dan mengunggahnya di media sosial, teman-teman mereka akan menjadi penasaran kemudian berkunjung ke wisata lembah desa. Hasil wawancara peneliti dengan pengunjung menunjukkan jika mereka datang ke lokasi setelah mendapat kabar dari teman maupun lewat media sosial. Pengunjung dari Kecamatan Semanu misalnya, memperoleh informasi wisata lembah desa lewat media *Whatsapp*. Hal ini sesuai dengan ekspektasi mereka yaitu daerah yang sejuk, pemandangan yang indah dan kualitas makanan yang enak. Pengunjung dari Kecamatan Saptosari dan Gedangsari mengemukakan jika mereka baru pertama kali ke wisata lembah desa. Informasi tempat wisata ini mereka peroleh lewat *for you page (fyp) Tiktok* yang cukup viral. Tempat wisata yang mereka kunjungi bagus karena mereka disuguhkan dengan spot foto yang menarik dan pemandangan yang asri. Menurut mereka, kupon yang diperoleh dapat ditukar dengan es teh namun dikenakan tambahan biaya. Ada pula pengunjung yang datang secara rombongan dari sekolah dasar di Kecamatan Ngawen. Menurut mereka wisata lembah sesuai dengan ekspektasi mereka yaitu makanan dengan ciri khas desa. Selain itu, wisata ini juga unik karena pengunjung diberikan minuman gratis berupa teh poci hangat.

Hambatan dan Dukungan

Dalam perjalanannya, pengelolaan wisata lembah juga pernah mengalami hambatan. Hal ini terjadi terutama di awal pembukaan wisata lembah desa. Menurut pihak pengelola, pada saat itu fasilitas wisata masih sangat minim. Hanya terdapat 2 gazebo, 1 kandang, sedikit spot foto dan belum ada panggung acara. Di sisi lain, pengunjung hampir mencapai empat

ribu orang dengan kondisi wisata yang masih belum tertata dengan baik. Ini merupakan masalah pendanaan yang tidak cukup. Dana desa untuk wisata termasuk minim karena dana desa juga dialokasikan untuk beberapa program lain. Walaupun ada investor yang bersedia mengatasi hambatan itu, namun pengelola tidak berani untuk mengakses kesempatan tersebut dikarenakan komitmen untuk meninggalkan kepengurusan dengan tuntas tanpa ada hutang dan komitmen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana kutipan wawancara di atas. Hambatan kedua terletak di pengorganisasian, mengingat pengelolaan wisata lembah merupakan hal yang perdana terutama konsep teh poci gratis yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat pada saat itu. Hambatan yang ketiga adalah masalah ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pengunjung yang datang ke wisata lembah desa. Seperti masalah kenyamanan masyarakat ketika mendengar musik yang diputar saat malam minggu. Namun, hal ini diatasi lewat sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat setempat.

Selain hambatan, terdapat hal yang mendukung perkembangan wisata lembah desa kedepan. Pihak pengelola justru melihat hambatan ini menjadi kelebihan. Masalah pendanaan yang tidak memadai membuat perkembangan wisata lembah desa Pulutan berjalan dengan lambat. Oleh karenanya, kedatangan pengunjung ke wisata lembah desa untuk kedua kalinya akan disuguhkan dengan perkembangan yang berbeda. Ini membuat pengunjung penasaran dan memilih untuk datang kembali ke wisata lembah desa. Dukungan selanjutnya terletak pada pedagang kuliner tradisional di kawasan tersebut. Pedagang kuliner dengan senang hati bermitra dan mendengar arahan dari pihak pengelola. Di sisi lain, ini menambah pendapatan mereka dari profesi sebelumnya. Bahkan, beberapa masyarakat di sekitar bersedia untuk mengantri penyewaan kios pedagang tersebut. Banyak masyarakat di Desa Pulutan yang sudah tahu dan sadar akan pentingnya pengelolaan wisata lembah desa. Karena hal ini, pihak pengelola menerangkan ke masyarakat untuk melihat peluang yang ada seperti peluang memproduksi bahan makanan untuk di jual ke pedagang. Apalagi perencanaan dari pihak pengelola yang ingin membuat paket-paket wisata. Dukungan ini yang membuat pemberdayaan masyarakat

akan terus berjalan dan berproses. Dukungan ini juga membuat wisata lembah desa berpeluang untuk semakin berkembang kedepannya.

Diskusi

Wisata Lembah Desa Pulutan telah menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat Desa Pulutan dengan memanfaatkan potensi lokal yang mereka miliki. Dengan wisata ini masyarakat yang dulunya hanya sebagai buruh tani bahkan hanya mengurus rumah tangga kini bisa mendapatkan tambahan penghasilan berkat berjualan di lokasi wisata. Setidaknya sampai saat ini sudah terdapat 25 los berjualan yang setiap losnya ada 2 hingga 3 penjual. Selain itu pemuda sekitar juga dilibatkan dalam pengelolaan lokasi dengan bekerja sebagai petugas parkir, karcis dan pemandu wisata atau fasilitator. Wisata Lembah Desa juga menjadi bidang usaha andalan bagi BUMDes Maju Mandiri Desa Pulutan dengan memberikan sumbangsih pendapatan asli desa. Walaupun menggunakan tahap-tahap pemberdayaan dalam mengelola wisata lembah, namun ada beberapa temuan yang perlu didiskusikan.

Tata Kelola Wisata Secara Mandiri Untuk Memberdayakan Masyarakat

Konsep tata kelola wisata desa pada umumnya memiliki Aktor yang mendominasi pengelolaan, nyatanya dominasi terdistribusi dalam masyarakat. Wahyuningsih & Pradana (2021) dalam temuannya mengemukakan bahwa banyak desa wisata yang berkembang dengan meminggirkan masyarakat setempat. Mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata. Hanya sebatas menjadi pekerja saja. Namun berbeda dengan temuan kami dalam pengelolaan Wisata Lembah Desa Pulutan. Wisata Lembah Desa Pulutan berkembang karena partisipasi semua elemen masyarakat. Masing-masing pihak menerima pendapatan dan pembagian hasil atas keterlibatan mereka dalam tata kelola wisata lembah desa. Di Wisata Lembah Desa Pulutan, pengelola merupakan masyarakat setempat yang terdiri dari BUMDes, juru parkir, petugas tiket dan pedagang makanan. Masing-masing memiliki peran dan tugas masing-masing tetapi juga memiliki hak untuk memberikan sumbangsih ide untuk pengembangan wisata. Adanya forum setiap minggu menjadi wadah bagi pengelola untuk menyampaikan ide dan gagasan.

Selain itu, BUMDes selaku pengelola yang memiliki peluang untuk mendatangkan investor lebih memilih untuk mengembangkan wisata dengan kemampuan dana yang mereka miliki. BUMDes memiliki prinsip jika menggunakan dana investor maka ada peluang masyarakat tidak dapat menikmati hasil dari pengembangan wisata. Adanya wisata yang dikelola oleh desa secara tidak langsung mendatangkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya dikarenakan terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat (Jamalina & Wardani, 2017).

Promosi Wisata dari Pengunjung ke Pengunjung Lain

Perkembangan desa wisata juga tidak terlepas dari informasi dan keterjangkauan wisatawan tentang wisata desa. Raharjana & Putra mengemukakan bahwa banyak desa wisata yang belum dikenal masyarakat karena ketidakmampuan pengelola dalam mempromosikan desa wisata (Raharjana & Putra, 2020). Mereka menganjurkan agar pengelola memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Namun berbeda dengan temuan kami dalam pengelolaan Wisata Lembah Desa Pulutan. Perkembangan Wisata Lembah Desa Pulutan menjadi terkenal karena pengunjung yang datang. Pasalnya, pengunjung yang mempromosikan wisata kepada kerabat lewat media sosial pribadi mereka. Hal ini dikonfirmasi oleh pengunjung lain bahwa mereka mendapatkan informasi wisata lembah dari kerabat mereka yang sebelumnya pernah berkunjung. Informasi yang beredar adalah pemandangan yang indah, minuman gratis dan kuliner yang relatif terjangkau. Pengelola wisata lembah mengaku kewalahan ketika pengunjung pada hari-hari libur berkunjung dengan jumlah yang membludak.

Optimalisasi Potensi Lokal Sebagai Elemen Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki tahap pengkapasitasan yang perlu dikaji lebih jauh. Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) mengemukakan bahwa tahap pengkapasitasan dapat dilakukan secara personal, lokarya maupun lewat lembaga formal. Pengkapasitasan

ini dapat berupa pembekalan keterampilan dan teknik sehingga sasaran pemberdayaan memiliki kemampuan yang dapat mereka kuasai. Namun, berbeda dengan temuan kami. Pengelola berupa pedagang kuliner tidak mendapatkan pelatihan keterampilan. Hal ini dikarenakan pengelola telah memiliki pengetahuan lokal dalam mengelola bahan makanan. Implikasinya, Wisata Lembah Desa Pulutan menjajikan kuliner yang bervariasi. Pedagang mengemukakan jikalau ada pelatihan untuk memasak masakan akan sulit karena berbagai macam makanan yang ada. Sangat tidak mungkin untuk melakukan pelatihan pembuatan makanan satu persatu. Oleh karena itu, pengkapasitasan dilakukan dalam aspek kognitif. Pengelola melakukan studi banding desa wisata lain dalam rangka mengamati, meniru dan melakukan modifikasi. Aspek kognitif ini juga lewat rapat dan evaluasi yang pengelola selenggarakan seminggu sekali. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pedagang dalam melayani pengunjung. Misalnya, pedagang tertentu memiliki pelayanan yang lama atau mendapat keluhan tertentu, hal itu kelak disampaikan dalam rapat evaluasi. Pedagang belajar dari pengalaman mereka untuk melakukan perbaikan kedepannya (*trial-error*).

Pengelolaan Wisata Lembah Desa Pulutan menjadi bukti bahwa masyarakat desa tidak terpinggirkan dalam pengembangan wisata desa. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat sebagai pengelola yang terdiri dari BUMDes, juru parkir, petugas karcis dan pedagang kuliner. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mengemukakan ide dan gagasan dalam rapat yang diselenggarakan seminggu sekali. Walaupun ada peluang untuk mendatangkan investor, BUMDes selaku pengelola lebih memilih untuk mendayagunakan dana mandiri hasil pengelolaan wisata. Pengembangan wisata desa seharusnya dilakukan secara mandiri walaupun perkembangannya lambat dan bertahap. Implikasinya hak-hak masyarakat desa tetap terjamin baik itu dalam perencanaan, proses dan manfaat perkembangan wisata desa. Selain itu, pengkapasitasan sebagai tahap pemberdayaan tidak harus melalui pelatihan keterampilan. Hal Ini dikarenakan masyarakat sebenarnya sudah memiliki pengetahuan lokal, yang lebih butuh pengarahannya dan wadah untuk mengimplementasikan keterampilan mereka. Pengembangan Wisata Lembah Desa Pulutan menjadi alternatif baru dalam memajukan desa.

Kesimpulan

Pengelolaan wisata lembah desa Pulutan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Potensi lokal tersebut terletak di kawasan lembah desa yang memiliki potensi sebagai tempat wisata. Alasan pihak pengelola memilih pemberdayaan masyarakat karena ingin melibatkan dan memprioritaskan terlebih dahulu masyarakat yang ada di desa Pulutan. Pemberdayaan masyarakat di wisata lembah desa dilakukan secara bertahap yang dimulai dari penyadaran, pengkapasitasan dan pemberdayaan. Penyadaran yaitu dengan menganalisa potensi dan peluang yang ada di desa. Tahapan ini juga berupa penyatuan konsep wisata lembah desa terutama konsep minuman teh poci gratis. Sedangkan pengkapasitasan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya pengelola wisata dan pedagang melalui pelatihan, pembekalan, studi banding, rapat maupun pembelajaran berbasis pengalaman.

Adapun pemberdayaan adalah memberikan kuasa maupun otoritas kepada masyarakat yang memiliki kapasitas untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata yaitu dengan menjajakan kuliner tradisional sesuai dengan konsep wisata lembah desa. Dalam perjalanannya, pemberdayaan masyarakat diselingi dengan beberapa hambatan maupun dukungan. Hambatan-hambatan tersebut terjadi terutama di awal pembukaan wisata ini seperti pendanaan, manajemen maupun kesiapan pengelola, pedagang dan masyarakat. Walaupun demikian, hambatan ini justru dipandang oleh pihak pengelola sebagai kelebihan. Alasan mengapa pemberdayaan masyarakat yang dipilih juga dikarenakan masyarakat yang bersedia untuk mengikuti program pengembangan wisata lembah selain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Karena wisata lembah desa, masyarakat di desa Pulutan semakin sadar akan peluang di wisata lembah desa. Hal ini merupakan potensi untuk menjadikan wisata lembah desa semakin berkembang kedepannya.

Penelitian ini masih memiliki hal yang belum ditelusuri seperti potensi desa untuk memproduksi bahan makanan yang akan dijual ke pedagang kuliner wisata lembah desa. Hal ini tentu merupakan penelitian yang dapat dilanjutkan. Informasi dari pihak pengelola bahwa akan ada paket wisata tambahan maka pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat

kedepannya juga akan semakin bervariasi di Desa Pulutan. Selain itu sinergitas antar masyarakat perlu ditingkatkan pasalnya masih banyak calon pedagang yang mengantri agar bisa berjualan namun terhalang oleh fasilitas kios yang terbatas. Perlu kemudian sistem yang mengakomodir permasalahan tersebut misalnya calon pedagang yang belum berkesempatan berjualan di wisata bisa menitipkan dagangan di tempat khusus atau menjadi supplier bahan mentah seperti tempe untuk pembuatan gorengan atau gula batu untuk pembuatan teh poci. Dengan demikian semua masyarakat bisa berdaya karena perputaran keuangan menyebar merata di lingkup wisata.

Referensi

- Alfitri. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, D. S. (2020). *Sejahtera di Desa: Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal di Pasar Ekologis Argo Wijil Desa Gari Gunung Kidul* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50326/>
- Boley, B. B., Strzelecka, M., & Watson, A. (2018). Place distinctiveness, psychological empowerment, and support for tourism. *Annals of Tourism Research*, 70(December 2017), pp. 137–139. doi: 10.1016/j.annals.2017.12.010
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chauduri, A. (2016). Understanding 'Empowerment': *Journal of Development Policy and Practice*, 1(2), pp. 121–141. doi: 10.1177/2455133315612298
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications, Inc.
- Damanik, J. (2013). *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Freire, P. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- JADESTA. (2022). Jejaring Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved January 2, 2023, from <https://jadesta.kemeparakraf.go.id/peta>
- Jamalina, I. A., & Wardani, D. T. K. (2017). Strategi pengembangan ekowisata melalui konsep community based tourism (CBT) dan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), pp. 71–85. doi: 10.18196/jesp.18.1.4008
- Kristanto, T. B. A., & Putri, A. A. (2021). Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), pp. 43–54. doi: 10.22146/jds.2272
- Latifah, S. (2019). *Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mardi Gemi Dalam Pengelolaan Pasar Ekologis Argo Wijil Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul* (Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/177792>
- Masitah, I. (2019). Pengembangan wisata oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), pp. 45–56. doi: 10.25157/dinamika.v6i3.2806
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Moayerian, N., McGehee, N. G., & Stephenson, M. O. (2022). Community cultural development: Exploring the connections between collective art making, capacity building and sustainable community-based tourism. *Annals of Tourism Research*, 93, 103355. doi: 10.1016/j.annals.2022.103355
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Octastefani, T., Prabaningrum, G., & Mutia Sadasri, L. (2019). Pasar Ekologis Sebagai Arah Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Mardi Gemi Di Desa Gari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), pp. 1–18. doi: 10.14421/jpm.2018.021-01
- Raharjana, D. T., & Putra, H. S. A. (2020). Penguatan SDM dalam E-Marketing untuk promosi desa wisata di Kabupaten Malang. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2), pp. 140–151. doi: 10.22146/jnp.60403
- Rochman, N. (2017). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *EQUILIBRIA PENDIDIKAN : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 1(1), 59. doi: 10.26877/ep.v1i1.1831
- Rozaki, A., Sujito, A., Hidayana, B., Siahaan, H., Krisdyatmiko, Zamroni, S., ... Hariyanto, T. (2006). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan; Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa* (S. Eko & Krisdyatmiko, Eds.). Yogyakarta: IRE.
- Salim, I., Syafi'ie, M., & Elisabeth, N. (2015). *Indonesia Dalam Desa Inklusi* (I. Salim, Ed.). Yogyakarta: SIGAB.
- Santoso, A. A. P. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2), pp. 33–48. doi: 10.33701/j-3p.v7i2.2930
- Sistem Informasi Desa Pulutan. (2019). Wisata Edukasi Lembah Desa Pulutan Mulai Ngehits. Retrieved January 5, 2023, from <https://desapulutan.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/420-Wisata-Edukasi-Lembah-Desa-Pulutan-Mulai-Ngehits>
- Sorot GunungKidul. (2023, January). *Mulai viral ! Obyek Wisata Lembah Desa Dongkrak Ekonomi Warga*. Retrieved from <https://gunungkidul.sorot.co/berita-106394-mulai-viral--obyek-wisata-lembah-desa-dongkrak-ekonomi-warga.html>
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparjan, & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam perspektif partisipasi masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), pp. 91–106. doi: 10.22212/aspirasi.v10i2.1386

Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan masyarakat Desa Hendrosari melalui pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 9(2), pp. 323–334. doi: 10.26740/publika.v9n2.p323-334

Wastutiningsih, S. P. (2004). Pemberdayaan petani dan kemandirian desa. *Dinamika Pedesaan Dan Kawasan*, 4(4), pp. 12–18.

Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.